

Pengaruh Kepemilikan Publik, NPM, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di BEI

Novia Ardiana^{1*}, Ajeng Tita Nawangsari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

¹diananova2203@gmail.com, ²ajeng.tita@uinsa.ac.id

Abstract

The principal emphasis of this study lies in evaluating the influence exerted by Public Ownership, Net Profit Margin (NPM), Solvency, and the contribution of organizational magnitude to CSR disclosure. Quantitative data were acquired in this study by means of analyzing existing documents. The research population includes 70 business entities listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2023-2024, with a total of 25 business entities used as samples through purposive sampling. The study utilized secondary data obtained from the official Indonesia Stock Exchange portal (www.idx.co.id) as well as the portals of each business entity. The influence between variables was assessed through multiple linear regression data analysis. The research findings indicate that the variables of public ownership level and company size show a significant impact with a positive relationship direction on the extent of CSR reporting. On the contrary, the Net Profit Margin (NPM) and solvency level variables have been proven not to show a significant impact on CSR reporting.

Keywords: *Public Ownership, Net Profit Margin, Solvency, Company Size, Corporate Social Responsibility*

1. Pendahuluan

Pada masa kini, kontribusi sosial entitas bisnis telah berkembang menjadi aspek fundamental dalam tata kelola perusahaan. CSR sudah tidak dianggap sebagai aktivitas filantropi yang bersifat sukarela, tetapi sebagai kewajiban strategis yang berhubungan erat dengan keberlanjutan perusahaan dan legitimasi di mata publik. Di Indonesia, pengungkapan CSR diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No.40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta peraturan khusus pada Badan Usaha Milik Negara No. Per-5/MBU/20017 tentang Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil. Awalnya, konsep CSR sendiri lahir dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha dan kemudian berkembang menjadi strategi keberlanjutan yang menyeimbangkan tiga dimensi utama, yakni keuntungan, bumi, dan manusia. Sebuah entitas bisnis yang ideal bukan sekedar berfokus pada pencapaian laba finansial, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Budhaeri et al., 2024).

Di Indonesia, urgensi pelaksanaan CSR semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Sektor infrastruktur memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, sebab proyek-proyek infrastruktur melibatkan penggunaan sumber daya besar, seperti melalui penyediaan transportasi, energi, dan telekomunikasi. Namun disisi lain, aktivitas pada sektor ini seringkali menuai kontroversi terkait relokasi masyarakat, kerusakan lingkungan akibat pembangunan berskala besar seperti pembangunan jalan tol dan kereta cepat, dan konflik sosial di daerah proyek. Kondisi tersebut menimbulkan tuntutan transparansi yang lebih tinggi terhadap pengungkapan CSR sebagai sarana untuk menjaga legitimasi publik (Nugraheni et al., 2022).

Pengungkapan CSR disampaikan oleh perusahaan melalui dokumen publikasi yang dikenal dengan *sustainability report*. *Sustainability report* memaparkan performa ekonomi, lingkungan, serta sosial yang dipergunakan sebagai acuan dalam menilai derajat kepatuhan entitas bisnis terhadap tanggung jawab sosial. Awalnya,

penyusunan laporan tersebut mengacu pada standar GRI versi tahun 2016, namun seiring waktu mengalami penyempurnaan hingga versi terbaru yakni GRI Standard 2021. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan transparansi, standar ini hadir dengan indikator pengungkapan yang lebih komprehensif. GRI 2021 melakukan restrukturisasi besar dengan menetapkan tiga standar universal, yaitu mencakup fondasi (GRI 1), pengungkapan umum (GRI 2), dan isu material (GRI 3).

Dari sisi indikator, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (GRI 200, 300, 400) juga mengalami penyesuaian agar lebih adaptif terhadap isu-isu global, misalnya pada indikator limbah (GRI 306), rantai pasok, serta hak asasi manusia. Standar ini juga membedakan dua format pelaporan, yaitu “*in accordance*” dan “*with reference*”. Dengan demikian, GRI 2021 tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, melainkan juga mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis jangka panjang (Munandar et al., 2021). Sejumlah penelitian terdahulu juga membahas terkait penerapan GRI Standards 2021 di perusahaan. Misalnya, hasil temuan (Salma et al., 2024) yang menyoroti bagaimana GRI 2021 digunakan sebagai acuan dalam mengungkapkan isu ketenagakerjaan dan hak asasi manusia dalam *sustainability report*. Selanjutnya studi yang dilakukan (Rizkynanda et al., 2024) menkaji efektivitas implementasi GRI 2021 dalam pelaporan aspek kesejahteraan pekerja dan kesetaraan, yang menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola keberlanjutan. Riset ini menyoroti untuk menilai sejauh mana perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 diberlakukan efektif pada 1 januari 2023. Standar terbaru ini tidak hanya memperkuat kerangka pelaporan keberlanjutan, tetapi juga menekankan pentingnya *due diligence*, keterlibatan aktif pemangku kepentingan, serta

pengintegrasian aspek hak asasi manusia dalam seluruh aktivitas perusahaan. Penerapan GRI 2021 menjadi fenomena penting bagi perusahaan di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada sektor infrastruktur, yang aktivitas usahanya sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik dan berdampak luas terhadap lingkungan serta sosial masyarakat.

Namun demikian, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa implementasi GRI 2021 masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan *annual report* dan *sustainability report* dari perusahaan-perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI, sebagian perusahaan telah berupaya menyesuaikan dengan pedoman GRI 2021, tetapi sebagian lainnya masih menggunakan standar sebelumnya atau hanya mengadopsi setengah dari indikator yang disyaratkan. Selain faktor regulasi, variabel internal perusahaan juga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Variabel internal seperti kepemilikan publik, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan sering diuji sebagai determinan pengungkapan CSR.

Meskipun sejumlah penelitian nasional telah membahas CSR dan determinannya, masih sedikit penelitian yang memfokuskan pada perusahaan infrastruktur Indonesia setelah penerapan standar pelaporan keberlanjutan terbaru (GRI Standards 2021). Studi infrastruktur Indonesia sebelumnya masih menggunakan data sebelum tahun 2023 dan belum mempertimbangkan kerangka pelaporan GRI 2021. Dengan pertimbangan di atas, penelitian ini memiliki fokus utama untuk menelaah pengaruh kepemilikan publik, NPM, solvabilitas, dan ukuran entitas bisnis terhadap pelaporan pertanggungjawaban sosial entitas bisnis (CSR) di sektor infrastruktur yang tercatat di BEI selama periode 2023-2024, dengan penekanan pada entitas bisnis yang menyusun *sustainability report* berdasarkan GRI Standards 2021.

2. Landasan Teori

2.1 Legitimacy Theory

Legitimacy Theory adalah teori yang kerap dipakai dalam riset akuntansi dan manajemen, khususnya dalam konteks pelaporan sosial dan lingkungan. Legitimacy theory sering digunakan sebagai landasan utama untuk memahami perilaku organisasi. Beberapa penelitian akuntansi memanfaatkan teori ini untuk menjelaskan pengungkapan *corporate social responsibility*, serta isu-isu terkait lingkungan (Badjuri et al., 2021). Teori ini didasarkan pada anggapan mengenai adanya kontrak sosial antara organisasi dan Masyarakat secara umum, sehingga perusahaan dituntut untuk mengadaptasikan aktivitasnya dengan norma, etika, serta kebijakan yang berlaku agar memperoleh legitimasi sosial. Keberlangsungan perusahaan sangat ditentukan oleh sejauh mana publik memandang kegiatan operasionalnya selaras dengan nilai dan prinsip yang dianut oleh masyarakat (Sarra & Alamsyah, 2020).

2.2 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility dipahami sebagai bentuk dedikasi jangka panjang entitas bisnis untuk mengintegrasikan praktik bisnisnya dengan kepedulian sosial secara etis, menaati peraturan yang berlaku, dan berperan aktif dalam mendorong perkembangan ekonomi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan komunita secara lebih luas (Setiadarma, 2021).

Implementasi CSR mencerminkan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan maupun yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya (Santo, 2022). Urgensi pengungkapan CSR erat kaitannya dengan adanya kesepahaman antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Melalui kontrak sosial tersebut, perusahaan terikat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan eksternal,

sehingga kewajibannya tidak hanya terbatas pada kepentingan investor, melainkan juga mencakup seluruh kelompok yang terkena dampak dari kegiatan operasional yang dijalankan (Cyhintia & Sofyan, 2023).

2.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan Publik dipahami sebagai bagian kepemilikan perusahaan yang berada di tangan masyarakat luas (Achyar & Arif, 2024). Saham ini dipegang oleh individu atau pihak eksternal yang tidak termasuk dalam jajaran manajemen maupun memiliki hubungan afiliasi langsung dengan entitas bisnis. Semakin tinggi porsi kepemilikan saham publik, semakin tinggi pula keterlibatan pihak luar dalam struktur kepemilikan. Kondisi tersebut pada dasarnya memperkuat tuntutan terhadap keterbukaan informasi. Untuk merespons hal ini, perusahaan umumnya meningkatkan kualitas serta kuantitas pengungkapan dalam laporan tahunan agar dapat memenuhi kebutuhan informasi investor sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen (Metri et al., 2021).

2.4 Net Profit Margin

Net Profit Margin mempresentasikan indikator yang menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu mengonversi pendapatan menjadi laba bersih setelah seluruh biaya operasional, beban lain-lain, serta kewajiban pajak dikurangkan dari total pendapatan penjualan. Rasio ini menunjukkan persentase laba bersih terhadap penjualan bersih, sehingga mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola biaya operasional untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. NPM juga memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tingkat profitabilitas dari keseluruhan penjualan yang diperoleh, sekaligus menunjukkan efisiensi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas penjualannya. Selain itu, rasio ini dapat membantu menilai sejauh mana strategi operasional dan

kebijakan biaya yang diterapkan perusahaan berjalan dengan baik, serta menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja keuangannya secara berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan bisnis (Nugraha & Susyana, 2021).

2.5 Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada modal sendiri dibandingkan dengan dana pinjaman dalam membiayai seluruh aset yang dimilikinya, sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta tingkat kemandiriannya dalam struktur pendanaan. Solvabilitas juga menjelaskan kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan dalam menghadapi beban utang jangka panjang, menjaga stabilitas keuangannya, serta mempertahankan keberlangsungan operasional ketika menghadapi tekanan finansial. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan membandingkan porsi aset yang dibiayai oleh ekuitas pemegang saham dengan aset yang bersumber dari kreditur, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan perusahaan dalam mengelola struktur modal, menyeimbangkan risiko pendanaan, dan menjaga kesehatan finansial secara berkelanjutan (Christiawan & Andayani, 2023).

2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menunjukkan sejauh mana Perusahaan mencerminkan skala atau besaran suatu entitas bisnis, yang dapat menunjukkan apakah entitas bisnis tersebut tergolong besar atau kecil dalam operasional dan kapasitasnya. Skala ini biasanya diukur menggunakan indikator seperti total asset, volume penjualan, maupun nilai kapitalisasi pasar. Dari ketiga indikator tersebut, total asset dipandang lebih stabil dibandingkan penjualan karena penjualan memiliki kecenderungan berfluktuasi setiap tahun, sedangkan asset relatif konsisten. Perusahaan berskala besar umumnya mendapat perhatian lebih dari

masyarakat dan para pemangku kepentingan, sehingga mereka cenderung menyajikan pengungkapan CSR yang lebih komprehensif untuk menjaga reputasi, memenuhi ekspektasi publik, dan menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih luas (Rukmana et al., 2020).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan CSR

Hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh (Herlina, 2021) dan (Siregar, 2025) mengindikasikan kepemilikan publik terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Akan tetapi, temuan lain yang berbeda disampaikan oleh (Aruan et al., 2021), menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak terbukti berkontribusi secara nyata dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Berdasarkan literatur terdahulu, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H₁: Kepemilikan Publik memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.7.2 Pengaruh Net Profit Margin terhadap Pengungkapan CSR

Hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh (Yanti et al., 2021) menunjukkan bahwa NPM memberikan kontribusi dengan arah positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Namun disisi lain, temuan yang dijelaskan oleh (Aruan et al., 2021) justru menunjukkan bahwa NPM tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Berdasarkan literatur terdahulu, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₂: *Net Profit Margin* memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.7.3 Pengaruh Solvabilitas terhadap Pengungkapan CSR

Hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh (Christiawan & Andayani,

2023) dan (Aruan et al., 2021) mempresentasikan bahwa solvabilitas memiliki kontribusi positif dan signifikan pada tingkat pengungkapan CSR. Akan tetapi, hasil temuan berbeda disampaikan oleh (Mardiah et al., 2023), yang menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak berkontribusi positif secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan literatur terdahulu, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H3: Solvabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.7.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR

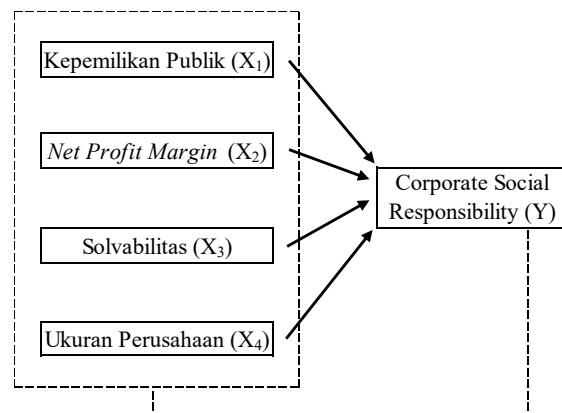
Hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh (Hardianti & Anwar, 2024) dan (Rahmadani & Burhanuddin, 2024) mengindikasikan bahwa ukuran entitas bisnis memiliki kontribusi dengan arah positif secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Akan tetapi, riset yang dikemukakan oleh (Apriyeni et al., 2024) menyatakan hal sebaliknya, dimana ukuran perusahaan terbukti tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Berdasarkan literatur terdahulu, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H4: Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.8 Kerangka Konspektual

Berlandaskan landasan teori serta temuan riset sebelumnya, faktor-faktor internal entitas bisnis juga terbukti berpengaruh terhadap komitmen *social entitas* (CSR), contohnya misal proporsi kepemilikan publik, NPM, solvabilitas, dan ukuran perusahaan diperkirakan memberikan kontribusi terhadap luasnya pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Contohnya misal proporsi kepemilikan publik, NPM, solvabilitas, dan ukuran perusahaan diperkirakan memberikan kontribusi terhadap luasnya pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keterkaitan antara variabel-variabel

tersebut dengan tingkat pengungkapan CSR dapat divisualisasikan melalui sebuah model terkait interaksi antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Dasar Pemikiran

Sumber : Data diolah penulis, 2025

3. Metode Penelitian

Pada riset ini, populasi penelitian difokuskan pada seluruh entitas bisnis yang bergerak di bidang infrastruktur dan tercatat aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2023–2024. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah entitas bisnis yang termasuk dalam populasi penelitian adalah sebanyak 70 perusahaan. Sampel dalam riset ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh (Ariska et al., 2020). Melalui metode ini, tidak seluruh anggota populasi dijadikan sampel, melainkan hanya entitas bisnis yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator yang dijadikan pedoman dalam proses seleksi sampel yakni sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Seleksi Sampel

Indikator Penentuan Sampel	Total
Entitas usaha pada sektor infrastruktur yang <i>listing</i> di BEI selama tahun 2023-2024	70
Entitas usaha pada sektor infrastruktur yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> dan <i>sustainability report</i> selama tahun 2023-2024	(4)

Entitas usaha pada sektor infrastruktur yang tidak menyajikan CSR dengan menggunakan acuan GRI Standards 2021 selama tahun 2023-2024	(41)
Total sampel perusahaan	25
Periode yang diteliti selama 2023-2024 (2 tahun)	2
Jumlah sampel akhir	50

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Basis data riset bersumber pada portal *official* yang dapat diakses secara daring, meliputi portal *official* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) ataupun portal *official* setiap entitas bisnis. Data yang dimanfaatkan berkarakteristik sebagai informasi data sekunder, khususnya pada *annual report* dan *sustainability report* entitas bisnis yang bergerak di bidang infrastruktur dalam kurun waktu 2023-2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menelaah serta mencatat informasi yang tersedia dalam laporan yang telah dipublikasikan periode tersebut. Untuk tahap analisis, penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda, dipergunakan untuk mengkaji keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebelum tahapan regresi diimplementasikan, sebagai permulaan dilaksanakan uji asumsi klasik guna memverifikasi terpenuhinya syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Selanjutnya, nilai *adjusted R-square* dimanfaatkan untuk menilai tingkat evektivitas kemampuan yang dimiliki variabel independen dalam memaparkan dinamika yang terjadi para variabel dependen.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Formula
Corporate Social Responsibility (CSR)	$CSRD = \frac{\sum x_{ij}}{nj}$
Kepemilikan Publik	Kepemilikan Publik = $\frac{\text{Jumlah Saham Publik}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$
Net Profit Margin	$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$
Solvabilitas	$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$
Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan = $\ln(\text{total asset})$

Sumber : Data diolah penulis, 2025

4. Hasil

4.1 Statistik Deskriptif

Mengacu pada Tabel 3. tersebut, bisa dipahami bahwa nilai *n* atau total sampel observasi untuk masing-masing variabel adalah sebanyak 50, yang diperoleh dari entitas bisnis dalam lingkup infrastruktur yang terpublikasi secara legal di BEI selama tahun 2023 – 2024.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Avg.	Std. Dev
X ₁	50	0,2	67,26	22,73	16,01
X ₂	50	-214,6	112,86	0,90	42,99
X ₃	50	11,94	143,05	62,31	27,85
X ₄	50	26,93	33,33	30,35	1,73
Y	50	0,26	0,97	0,62	0,15

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Variabel kepemilikan publik menyajikan nilai min sebanyak 0,2 dan nilai max sebanyak 67,26 dengan nilai avg sebanyak 22,73 dan std sebanyak 16,01 yang mengindikasikan tingkat penyebaran data. Variabel *net profit margin* (NPM) menyajikan nilai min sebanyak -214,60 dan nilai max sebanyak 112,86 dengan nilai avg sebanyak 0,90 dan std sebanyak 42,99 yang mengindikasikan tingkat penyebaran data. Variabel solvabilitas menyajikan nilai min sebanyak 11,94 dan nilai max sebanyak 143,05 dengan nilai avg sebanyak 62,31 dan std sebanyak 27,85 yang mengindikasikan tingkat penyebaran data. Variabel ukuran perusahaan menyajikan nilai min sebanyak 26,93 dan nilai max sebanyak 33,33 dengan nilai avg sebanyak 30,35 dan std sebanyak 1,73 yang mengindikasikan tingkat penyebaran data. Variabel CSR menyajikan nilai min sebanyak 0,26 dan nilai max sebanyak 0,97 dengan nilai avg sebanyak 0,62 dan std sebanyak 0,15 yang mengindikasikan tingkat penyebaran data.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk memastikan data penelitian, khususnya residual pada model regresi mengikuti pola distribusi normal, sehingga model regresi

memenuhi asumsi dasar dan hasil analisis dapat diinterpretasikan.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Test Statistic	0,104
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	0,200

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Kriteria ditetapkan berdasarkan nilai *Asymp. Sig.*, ketika nilai *Asymp. Sig.* yang diperoleh melebihi batas 0,05 maka hal tersebut sudah pasti mengindikasikan bahwa data tersebut sesuai dengan pola distribusi normal, sedangkan jika angka kurang dari 0,05 berarti mengindikasikan bahwa data tersebut tidak sesuai dengan pola distribusi normal. Berdasarkan hasil temuan pada Tabel 4, memperlihatkan bahwa angka *Asymp. Sig.* senilai $0,200 > 0,05$. Kondisi ini menegaskan bahwa sebaran data mengikuti pola distribusi normal serta memenuhi syarat uji normalitas.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diimplementasikan guna menilai keterkaitan linear di antara variabel independen yang membentuk model regresi. Parameter yang dijadikan acuan meliputi nilai *Tolerance* dan *VIF*. Ketika angka *Tolerance* melampaui 0,10 serta angka *VIF* tercatat kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kepemilikan Publik (X ₁)	0,827	1,209
NPM (X ₂)	0,829	1,206
Solvabilitas (X ₃)	0,614	1,629
Ukuran Perusahaan (X ₄)	0,781	1,28

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* keseluruhan variabel lebih kecil dari 10. Kondisi ini penelitian tidak mengalami gejala multikolinieritas serta memenuhi syarat uji multikolinieritas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas diterapkan dengan tujuan untuk menelaah konsistensi varians residual pada model regresi. Identifikasi dilakukan melalui uji *Glesjer*, dengan kriteria bahwa angka *Sig.* $> 0,05$ menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas, sedangkan angka *Sig.* $< 0,05$ mengindikasikan terjadinya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Glejser Analysis	
Variabel	Sig.
Kepemilikan Publik (X ₁)	0,106
NPM (X ₂)	0,710
Solvabilitas (X ₃)	0,898
Ukuran Perusahaan (X ₄)	0,571

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Mengacu pada hasil pengujian pada Tabel 6, memperlihatkan bahwa keseluruhan variabel bebas menunjukkan angka *Sig.* yang melebihi 0,05. Kondisi ini menegaskan bahwa data hasil riset tidak mengalami gejala heteroskedastisitas serta memenuhi kriteria yang disyaratkan uji heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi diterapkan untuk memverifikasi konsistensi dan independensi error pada model regresi dan memastikan data tidak saling berkorelasi antarperiode pengamatan.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Waston	Kriteria	Durbin Tabel
1,753	Du < Dw < 4-Du	1,7218 2,2782

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Keberadaan autokorelasi dapat mengakibatkan estimasi regresi menjadi tidak efisien dan menurunkan reliabilitas hasil analisis dan dapat menimbulkan bias dalam estimasi regresi sehingga mengurangi validitas model. Pengujian ini menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa data memenuhi syarat uji asumsi klasik. Identifikasi dilakukan melalui uji *Durbin-Waston* (DW) dengan ketentuan beberapa kriteria.

Kriteria penilainnya adalah jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 – DL, maka terjadi autokorelasi. Sedangkan ketika nilai DW berada di antara DU dan 4 – DU, autokorelasi tidak terjadi. Jika DW berada di rentang DL hingga DU atau 4 – DU hingga 4 – DL, maka kesimpulan mengenai autokorelasi tidak dapat ditarik.

Berdasarkan hasil pengujian, di dapatkan angka DU sebesar 1,7218, nilai DW yang diperoleh dari Tabel 7 senilai 1,753, dan angka 4 – DU sebesar 2,2782. Hasil menandakan bahwa nilai memenuhi kriteria $DU < DW < 4 - DU = 1,7218 < 1,753 < 2,2782$. Kondisi ini menegaskan bahwa data penelitian terbebas dari gejala autokorelasi serta memenuhi syarat uji autokorelasi.

4.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan pada Tabel 8, model penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antar variabel secara empiris. Model ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan serta arah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi, Uji F, dan Uji t

Adjusted R Square	0,134
Uji F/Simultan	Sig. 0,033
Uji t/Parsial	B Sig.
(Constant)	-0,023 0,885
Kepemilikan Publik (X ₁)	0,003 0,001
NPM (X ₂)	0,000 0,113
Solvabilitas (X ₃)	0,001 0,112
Ukuran Perusahaan (X ₄)	0,018 0,002

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Adapun formulasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{CSR} = -0,023 + 0,003 \text{ Kepemilikan Publik} + 0,000 \text{ NPM} + 0,001 \text{ Solvabilitas} + 0,018 \text{ Ukuran Perusahaan}$$

Nilai *constant* sebanyak -0,023 menunjukkan bahwa apabila variabel

Kepemilikan Publik, NPM, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan berada di angka 0, maka presentase pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam laporan perusahaan infrastruktur yang tercatat di BEI selama tahun 2023-2024 akan menurun sebesar -0,023.

Koefisiensi regresi untuk variabel Kepemilikan Publik sebanyak 0,003 mengindikasikan bahwa untuk setiap peningkatan sebanyak satu unit pada Kepemilikan Publik akan mengakibatkan peningkatan luas pengungkapan CSR sebanyak 0,003. Koefisiensi regresi untuk variabel NPM sebanyak 0,000 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sebanyak satu unit pada NPM tidak akan menyebabkan peningkatan ataupun penurunan pada luas pengungkapan CSR.

Koefisiensi regresi untuk variabel Solvabilitas sebanyak 0,001 mengindikasikan bahwa untuk setiap peningkatan sebanyak satu unit pada Solvabilitas akan menyebabkan peningkatan luas pengungkapan CSR sebesar 0,001. Koefisiensi regresi untuk variabel Ukuran Perusahaan sebanyak 0,018 mengindikasikan bahwa untuk setiap peningkatan sebanyak satu unit pada Ukuran Perusahaan akan menyebabkan peningkatan luas pengungkapan CSR sebesar 0,018.

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan informasi pada Tabel 8 tersebut, temuan dari Pengujian *Adjusted R-Squared* (R) memperlihatkan angka sebanyak 0,134 atau jika dalam persen sebanyak 13,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen pengungkapan CSR dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu Kepemilikan Publik, NPM, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan sebanyak 13,4%. Adapun sebanyak 86,6% proporsi lainnya berasal dari pengaruh faktor di samping variabel yang dikaji dalam riset ini, misalnya seperti leverage, kepemilikan asing, pertumbuhan perusahaan, dan variabel lainnya.

4.3.2 Uji F

Uji F secara kelompok yang ditampilkan di Tabel 8 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang diaplikasikan membawa dampak secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut dianggap signifikan apabila nilai *Sig.* kurang dari 0,05.

Setelah dilakukan pengujian, ditemukan bahwa angka *sig.* sebesar $0,033 < 0,05$. Maka dari itu, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa variabel Kepemilikan Publik (X_1), NPM (X_2), Solvabilitas (X_3), Ukuran Perusahaan (X_4) menunjukkan pengaruh signifikan secara kolektif terhadap variabel Pengungkapan CSR (Y).

4.3.3 Uji t

Berdasarkan pada Tabel 8 di atas, Uji t pada riset ini menyatakan hasil bahwa temuan pengujian menggunakan Uji t, memperlihatkan bahwa angka signifikan (*Sig.*) Kepemilikan Publik sebanyak $0,001 < 0,05$. Mengindikasikan bahwa Kepemilikan Publik (X_1) terbukti memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR (Y).

Temuan pengujian menggunakan Uji t, bahwa angka signifikan (*Sig.*) NPM (X_2) sebanyak $0,113 > 0,05$. Mengindikasikan bahwa NPM (X_2) terbukti tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR (Y).

Temuan pengujian menggunakan Uji t, memperlihatkan bahwa angka signifikan (*Sig.*) Solvabilitas (X_3) sebanyak $0,112 > 0,05$. Mengindikasikan bahwa Solvabilitas (X_3) terbukti tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR (Y).

Temuan pengujian menggunakan Uji t, memperlihatkan bahwa angka signifikan (*Sig.*) Ukuran Perusahaan (X_4) sebanyak $0,002 < 0,05$. Mengindikasikan bahwa Ukuran Perusahaan (X_4) terbukti memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR (Y).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Publik (X_1) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Y)

Berdasarkan pada temuan pengujian, mengindikasikan bahwa koefisien variabel Kepemilikan Publik bernilai positif sebanyak 0,003 dan angka (*Sig.*) sebanyak $0,001 < 0,05$. Ini berarti mengindikasikan bahwa variabel Kepemilikan Publik memperlihatkan pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR. Pada hipotesis pertama (H_1), diasumsikan bahwa Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil analisis, hipotesis ini terbukti valid dan diterima. Temuan tersebut selaras dengan hasil analisis (Herlina, 2021) dan (Siregar, 2025) yang memperlihatkan bahwa Kepemilikan Publik menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR.

Hasil tersebut selaras dengan *Legitimacy Theory* yang digunakan dalam penelitian ini. Semakin besar proporsi kepemilikan publik, semakin kuat dorongan perusahaan untuk menjaga kepercayaan dan penerimaan masyarakat. Kondisi ini meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk bersikap lebih transparan melalui pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan jumlah pemegang saham publik yang lebih besar, perusahaan menghadapi sorotan publik yang lebih tinggi, sehingga perlu memperluas pengungkapan CSR sebagai upaya mempertahankan legitimasi dan menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku.

Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan publik tinggi perlu lebih proaktif dalam strategi komunikasi CSR untuk menjaga kepercayaan investor. Selain itu, regulator dapat menggunakan informasi ini sebagai indikator untuk menargetkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan publik rendah. Secara

teoretis, hasil ini memperkuat pemahaman bahwa kepemilikan publik merupakan mekanisme eksternal yang mendorong transparansi perusahaan.

4.4.2 Pengaruh NPM (X₂) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y)

Berdasarkan pada temuan pengujian, mengindikasikan bahwa koefisien variabel NPM bernilai positif sebanyak 0,000 dan angka (Sig.) sebanyak $0,113 > 0,05$. Ini berarti merepresentasikan bahwa variabel NPM tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Pada hipotesis kedua (H_2), diasumsikan bahwa NPM berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil analisis, hipotesis ini tidak terbukti valid dan ditolak.

Tidak berpengaruhnya NPM dapat disebabkan karena besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan tidak menjadi faktor yang menentukan luasnya pengungkapan CSR. Pada beberapa perusahaan, termasuk sektor infrastruktur, sebagian besar keuntungan dialokasikan untuk ekspansi usaha, pembayaran kewajiban, dan kebutuhan operasional lainnya, sehingga peningkatan NPM tidak otomatis mendorong perusahaan meningkatkan pelaporan CSR.

Selain itu, aktivitas CSR lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan dan tuntutan eksternal dibandingkan kondisi profitabilitas jangka pendek. Oleh karena itu, perubahan tingkat laba tidak menunjukkan hubungan langsung dengan intensitas pengungkapan CSR. Temuan tersebut selaras dengan hasil analisis (Aruan et al., 2021) yang memperlihatkan bahwa variabel NPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR dan menegaskan bahwa laba perusahaan yang tinggi tidak secara otomatis mendorong peningkatan pengungkapan CSR, karena besarnya laba bersih pun tidak menjamin perusahaan akan menyajikan informasi CSR secara lebih luas.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus merancang strategi CSR yang independen dari kinerja profitabilitas jangka pendek. Manajemen perlu menetapkan kebijakan internal yang jelas untuk mendorong pengungkapan CSR, sementara investor dan pemangku kepentingan sebaiknya tidak hanya menilai CSR berdasarkan laba perusahaan. Dari sisi teoretis, temuan ini menegaskan keterbatasan faktor finansial dalam mempengaruhi praktik CSR.

4.4.3 Pengaruh Solvabilitas (X₃) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y)

Berdasarkan pada temuan pengujian, mengindikasikan bahwa koefisien variabel Solvabilitas bernilai positif sebanyak 0,001 dan angka (Sig.) sebanyak $0,112 > 0,05$. Ini berarti menunjukkan bahwa variabel Solvabilitas tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR. Pada hipotesis ketiga (H_3) diasumsikan bahwa Solvabilitas berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil analisis, hipotesis ini terbukti tidak valid dan ditolak.

Tidak berpengaruhnya Solvabilitas menunjukkan bahwa besarnya proporsi utang atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang tidak menjadi faktor yang menentukan seberapa luas perusahaan melakukan pengungkapan CSR. Pada perusahaan sektor infrastruktur, tingkat leverage yang tinggi merupakan kondisi yang umum karena pembiayaan proyek berskala besar banyak bergantung pada pinjaman. Situasi ini membuat perusahaan lebih berfokus pada pengelolaan risiko keuangan dan keberlanjutan operasional, sehingga keputusan terkait CSR tidak secara langsung bergantung pada rasio Solvabilitas.

Selain itu, kecenderungan perusahaan dalam melaporkan aktivitas CSR umumnya lebih dipengaruhi oleh kebijakan internal, strategi reputasi, tuntutan publik dan regulasi, daripada struktur pendanaan yang

dimiliki perusahaan. Dengan demikian, fluktuasi rasio Solvabilitas tidak menjadi faktor yang mampu mendorong perusahaan untuk menambah maupun mengurangi tingkat pengungkapan CSR. Temuan tersebut selaras dengan hasil analisis (Mardiah et al., 2023), menunjukkan bahwa Solvabilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR dan menegaskan bahwa tidak signifikannya pengaruh Solvabilitas terhadap Pengungkapan CSR dapat disebabkan oleh tidak selarasnya fokus antara pengelolaan keuangan dan aktivitas CSR.

Artinya, perusahaan perlu tetap merancang strategi CSR yang efektif tanpa bergantung pada rasio solvabilitas atau struktur pendanaan. Hal ini menekankan pentingnya peran kebijakan internal, reputasi, dan tuntutan publik sebagai faktor utama dalam praktik pengungkapan CSR, sekaligus memberikan kontribusi pada literatur yang menyoroti peran non-finansial dalam mendorong CSR.

4.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan (X_4) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y)

Berdasarkan pada temuan pengujian, mengindikasikan bahwa koefisien variabel Ukuran Perusahaan bernilai positif sebanyak 0,018 dan angka (Sig.) sebanyak $0,002 < 0,05$. Ini berarti menandakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR. Pada hipotesis keempat (H_4), diasumsikan bahwa Ukuran Perusahaan terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Berlandaskan pada hasil analisis, hipotesis ini terbukti valid dan diterima. Temuan tersebut selaras dengan hasil analisis (Hardianti & Anwar, 2024) dan (Rahmadani & Burhanuddin, 2024) yang memperlihatkan bahwa Ukuran Perusahaan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR.

Pengaruh signifikan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan berukuran

besar yang memiliki sumber daya lebih memadai untuk melaksanakan serta melaporkan aktivitas CSR. Berdasarkan Legitimacy Theory, perusahaan besar menghadapi perhatian publik dan regulator yang lebih besar sehingga memiliki kebutuhan lebih tinggi untuk menjaga citra dan legitimasi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan besar untuk melakukan pengungkapan CSR secara lebih luas sebagai bentuk transparansi. Selain itu, struktur organisasi yang lebih formal memungkinkan perusahaan mengintegrasikan CSR ke dalam kebijakan dan strategi perusahaan, sehingga tingkat pengungkapannya cenderung lebih tinggi dibandingkan perusahaan berukuran kecil.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan besar dapat memanfaatkan kapasitas dan struktur organisasinya untuk memperkuat program CSR berdampak sosial dan lingkungan. Perusahaan kecil perlu strategi kolaboratif atau inovatif agar pengungkapan CSR tetap optimal. Selain itu, hasil ini menekankan bahwa ukuran perusahaan merupakan determinan utama pengungkapan CSR dan memberikan kontribusi penting pada literatur yang menyoroti peran skala organisasi dalam praktik CSR.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan pada riset ini, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama, yakni variabel kepemilikan publik dan variabel ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Sedangkan variabel NPM dan variabel solvabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengugkapan CSR.

Secara keseluruhan, keempat variabel independen tersebut hanya mampu menjelaskan pengungkapan CSR sektor infrastruktur sebesar 13,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pengungkapan CSR dipengaruhi oleh faktor lain di luar ruang lingkup penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari

aspek kebijakan perusahaan, tekanan regulasi, karakteristik industri, kualitas tata kelola, maupun tuntutan pemangku kepentingan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan variabel lain, misalnya leverage, kepemilikan asing, pertumbuhan perusahaan, nilai perusahaan, dan variabel lainnya guna memperkaya hasil penelitian. Selain itu, mengingat keterbatasan pada jumlah sampel dalam penelitian ini, maka peningkatan jumlah sampel dalam penelitian berikutnya juga sangat direkomendasikan agar temuan yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasi dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Achyar, N. A., & Arif, A. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 571.
- Apriyeni, D., Putra, R. J., & Sari, F. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(1), 10–20.
<https://doi.org/10.31869/me.v10i1.4840>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 136.
<https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Aruan, D. A., Veronica, Liandy, C., Christina, D., & Fanny. (2021). Pengaruh Kepemilikan Publik, NPM, Pertumbuhan Perusahaan, dan Solvabilitas terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Infrastruktur. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 556–565.
- Badjuri, A., Jaeni, J., & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 3.
<https://doi.org/10.35315/jbe.v28i1.8534>
- Budhaeri, L. K., Ariani, D. V., Rahman, I. M., Rohmah, A., & Astarina, Y. (2024). Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas. *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 254–263.
- Christiawan, S. F., & Andayani. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–16.
- Cyhintia, L., & Sofyan, E. (2023). Pengaruh Akuntansi Hijau, Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 582.
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.69031>
- Hardianti, D., & Anwar, A. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 107–114.
<https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14031>
- Herlina, H. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris, Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan

- Corporate SOcial Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 1–17.
- Mardiah, A., Cindy, & Damayanti, W. M. (2023). Karakteristik Korporat Dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Media Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember*, 9(25), 56–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408421>
- Metri, M., Nurwati, S., & Sarlawa, R. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan CSR di Bursa Efek Indonesia. *JEMBA : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 1(1), 38–39. <https://doi.org/10.52300/jemba.v1i1.2490>
- Munandar, A., Triyana, E., Amin, R., Putri, R. S. E., & Rosmina. (2021). Analisis Program CSR dalam Sustainability Report Berdasarkan GRI Standards. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2727–2746. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1740>
- Nugraha, N. M., & Susyana, F. I. (2021). Pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets, dan Current Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba. *JEMPER : Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 3(1), 58.
- Nugraheni, P., Indrasari, A., & Hamzah, N. (2022). The Impact of Ownership Structure on CSR Disclosure: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 23(2), 229–243. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14633>
- Rahmadani, H. S., & Burhanuddin. (2024). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Company Size, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Basic Materials Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2022. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 3(2), 91–106. <https://doi.org/10.25299/jafar.2024.18355>
- Rizkynanda, M., Candraningsih, A. A., & Pandin, M. Y. R. (2024). Efektivitas Implementasi Standar GRI 2021 Dalam Pengungkapan Praktik Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan Pada Pt Aneka Tambang Tbk. *Kompleksitas : Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 13(2), 135–142. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol13no2.695>
- Rukmana, E., Hendri, E., & Rismansyah, R. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 3. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i1.5216>
- Salma, M. A., Estianingtyas, F., Yovita, M., & Pandin, R. (2024). Penerapan Standar Gri 2021 Dalam Laporan Keberlanjutan: Studi Kasus Pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 16(2), 1–11. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Santo, G. I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 173–174. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1166>
- Sarra, H. D., & Alamsyah, S. (2020). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan CSR. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 412.

- <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3577>
- Setiadarma, A. (2021). Etika Dalam Melakukan Kegiatan Corporate Social Responsibility(CSR). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 26(1), 6. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1211>
- Siregar, F. A. (2025). Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR : Peran Moderasi Political Connection. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5(2), 100–116.
- Yanti, N. L. E. K., Endiana, I. D. M., & Pramesti, I. G. A. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 42–51. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1676>